

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Hartati Dewi¹

I Gede Wardana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

E-mail: hartatiidewii18@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan mendasar yang terjadi dalam struktur sosial, di mana terjadi usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan berlokasi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. 2) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan dan belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3) belanja langsung merupakan variabel yang memediasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

Economic development is a fundamental change that occurs in the efforts are made to improve the standard of living of the community which can be measured by the level of real income per capita. In this study the objectives set forth, namely 1) analyze the influence of local original income and balancing funds on direct expenditure of districts/cities in Bali Province. 2) analyze the influence of local original income, balance funds, and direct expenditure on economic growth in districts/cities in Bali Province. 3) analyze the influence of local original income and balance funds on economic growth through direct district/city spending in Bali Province. This study uses secondary data and is located in district/cities in Bali Province using path analysis. The results of this study indicate that 1) local original income-source revenue and balance funds have a significant effect on direct expenditure. 2) local original income does not significantly influence economic growth, balance funds and direct expenditure have a significant effect on economic growth. 3) direct expenditure is a variable that mediates the effect of regional own-source revenue and balance funds on the economic growth of districts/cities in Bali Province.

keyword: *local original income, local revenue, balancing funds, direct expenditure, government expenditure, and economic growth.*

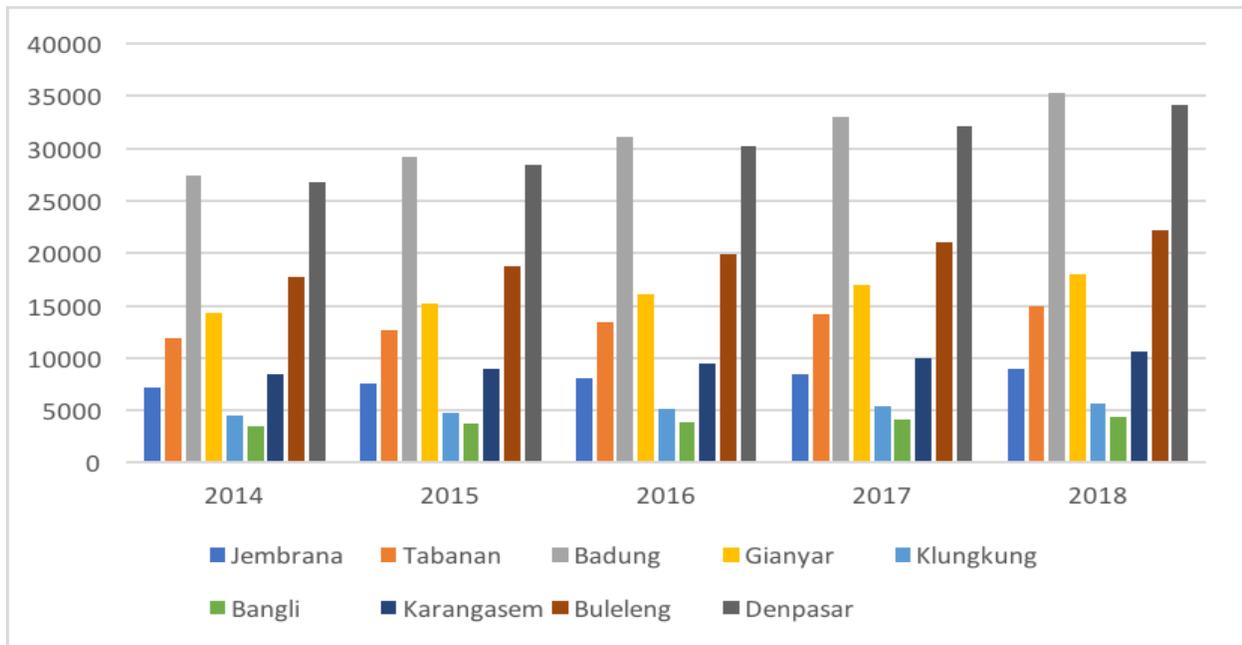
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan mendasar yang terjadi dalam struktur sosial, di mana terjadi usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pembangunan di Provinsi Bali masih terdapat masalah yang cukup pelik karena menyangkut isu-isu strategis, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, pembangunan infrastruktur yang belum memadai, serta menurunnya daya saing sumber daya manusia di Provinsi Bali, dari permasalahan pembangunan tersebut dapat ditetapkan tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga keseimbangan ekonomi dan pendistribusian pendapatan yang merata. Pembangunan ekonomi akan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi yang menyangkut permasalahan perekonomian dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang menyangkut modal fisik, modal manusia, teknologi, perdagangan, faktor kelembagaan, dan lain sebagainya (Azam, 2019). Pentingnya sektor dalam perekonomian tidak hanya terkait dengan Produk Domestik Bruto (PDB) saja, tetapi juga peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Suryahadi, *et al*, 2012). PDB menjadi salah satu indeks yang dapat diandalkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Roy, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan yang terjadi dalam perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Rustariyuni (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah yang pada umumnya dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat taraf hidup masyarakat. Suartha dan Yasa (2017) menyatakan bahwa

berhasil atau tidaknya pembangunan ditentukan oleh beberapa indikator yang dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi dan dicerminkan pada peningkatan PDRB.



Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019, (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan akan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan serta menghasilkan standar hidup yang lebih baik (Chinweoke, *et al*, 2014), tentunya dengan kinerja ekonomi yang kuat dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah (Kurniawan dan Managi, 2018). PDRB akan terus mengalami peningkatan pada tiap tahun dan tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun disisi lain masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki PDRB terendah. PDRB tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung dengan nilai rata-rata PDRB sebesar Rp31.224,59 milyar, selanjutnya disusul oleh Kota Denpasar dengan rata-rata PDRB sebesar Rp30.350,44 milyar, sedangkan PDRB terendah diraih oleh Kabupaten Bangli dengan nilai rata-rata PDRB sebesar Rp3.910,16 milyar.

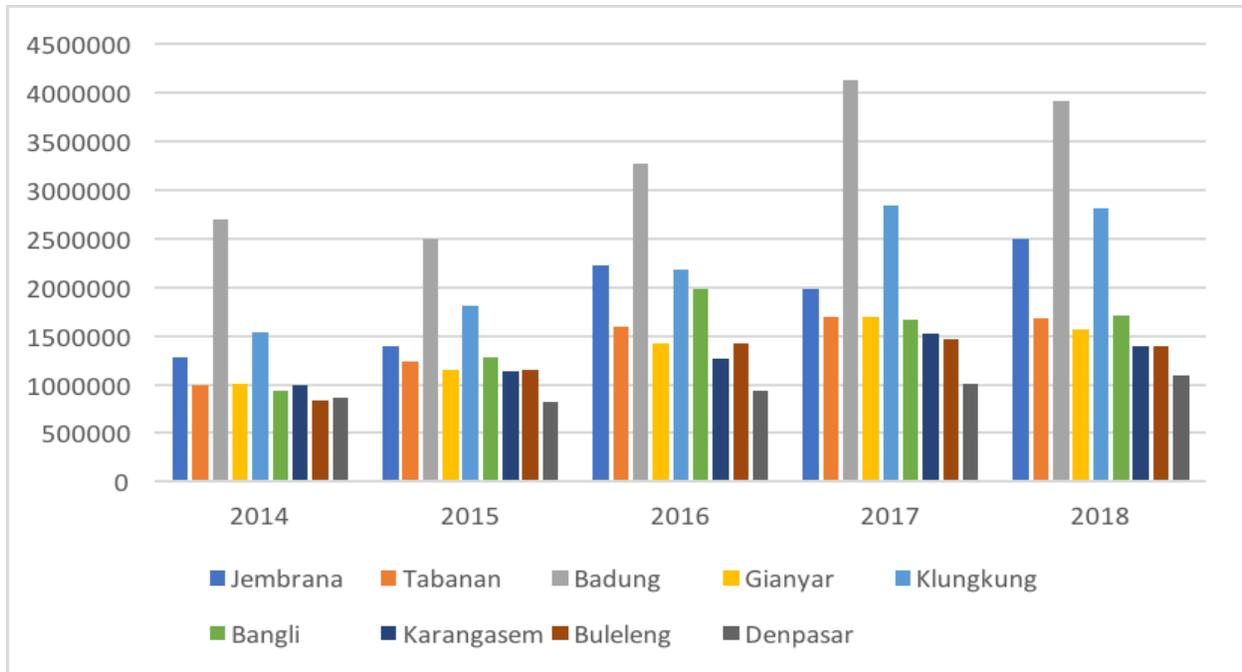
Kecenderungan nilai PDRB tertinggi masih didominasi oleh Kabupaten Badung, sedangkan nilai PDRB terendah masih di dominasi oleh Kabupaten Bangli atau dengan kata lain

terdapat selisih yang cukup besar antara nilai PDRB tertinggi dan nilai PDRB terendah. Selisih yang cukup besar tersebut terjadi karena ketidakmerataan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali (Yasa dan Arka, 2015). Selisih PDRB tersebut juga disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah yang diakibatkan oleh adanya perbedaan potensi pada masing-masing wilayah di Bali, salah satu potensi yang menyebabkan ketimpangan tersebut yaitu terkait dengan sektor pariwisata. Ketimpangan dalam pembangunan suatu daerah tidak dapat dihilangkan atau dengan kata lain suatu daerah pasti mengalami ketimpangan (Adipuryanti dan Sudibia, 2015). Sektor pariwisata yang hanya terpusat di sebagian daerah menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda-beda, dengan kata lain dapat menyebabkan terjadinya wilayah yang maju (*development region*) dan wilayah terbelakang (*underdevelopment region*) (Fajrii, dkk 2016). Meningkatnya ketimpangan akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi (Silva dan Sumarto, 2014).

Pembangunan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas, dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerah termasuk penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerah dan pengalokasian anggaran (APBD) (Uppun, 2016). Pemerintah daerah melakukan beberapa upaya yang nantinya diharapkan mampu mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri (Akudugu, 2012). Dalam menjalankan roda perekonomian, pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat (Kusuma, 2016). Salah satu bentuk dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Desentralisasi fiskal merupakan strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi sektor publik (Ali dan Batool, 2017).

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah sendiri tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Penerimaan APBD berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran pemerintah di dasarkan pada belanja daerah yang terdiri dari belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah yang produktif akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Kusuma dan Badrudin, 2016). Salah satu pengeluaran pemerintah yang produktif dapat dilihat dalam belanja daerah yang terkait dengan belanja langsung. Belanja langsung di sini dimaksudkan untuk membantu melaksanakan program pemerintahan, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.



Gambar 1.2 Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Rupiah Per Kapita)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019, (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Gambar di atas menunjukkan bahwa belanja langsung tertinggi terletak pada Kabupaten Badung dengan rata-rata belanja langsung mencapai Rp3.300.946,25 per kapita selanjutnya disusul oleh Kabupaten Klungkung dengan rata-rata belanja langsung mencapai Rp2.236.115,39 per kapita. Disisi lain masih terdapat daerah yang memiliki belanja langsung terendah, di mana belanja langsung terendah yaitu di Kota Denpasar dengan rata-rata nilai belanja langsung mencapai Rp944.361,65 per kapita. Perkembangan belanja langsung yang mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya disebabkan oleh belanja

pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi pada belanja langsung karena upah yang dikeluarkan untuk pegawai di setiap kabupaten/kota berbeda, sebagai contoh pegawai negeri di suatu daerah menerima upah yang berbeda dengan pegawai negeri di daerah lain, hal ini disebabkan oleh pangkat atau golongan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut. Permasalahan disisi lain dapat terlihat melalui belanja modal yang salah satunya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, dalam kenyataannya masih terdapat pembangunan infrastruktur yang belum memadai pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Realisasi otonomi daerah adalah salah satu rencana terpenting dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Rencana tersebut dikatakan penting karena pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam memaksimalkan potensi daerah dan juga perkembangan perekonomiannya, meminimalisir ketimpangan antar daerah, serta mencapai kualitas pelayanan publik yang memadai untuk setiap daerah. Realisasi otonomi daerah akan menimbulkan terjadinya desentralisasi, desentralisasi dimaksudkan dapat membawa perubahan pemikiran mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran dana antara sentral dan regional, serta desentralisasi di sini memberi kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan (Christia dan Ispriyarso, 2019).

Konsep baru dalam sistem keuangan daerah yaitu dana perimbangan (Chalid, 2005:13). Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mampu meningkatkan APBD. Dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Wati dan Fajar, 2017). Tujuan instrumen fiskal dari dana perimbangan yaitu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan dan investasi swasta. Kontribusi belanja pembangunan akan menarik investor untuk dapat berinvestasi di daerah yang bersangkutan sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi.

Pemberian otonomi daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk memperbaiki kondisi pelayanan publik, perkembangan perekonomian daerah, serta dalam mengembangkan berbagai terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Daerah-daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Tabel 1.1 Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014- 2018 (Rupiah Per Kapita)

Kabupaten/ Kota	Dana Perimbangan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	2.026.683,42	2.126.148,01	2.587.186,37	2.647.355,87	2.506.130,50
Tabanan	1.845.766,79	1.871.636,72	2.513.717,43	2.485.917,95	2.397.891,59
Badung	633.339,30	539.019,41	862.417,50	863.852,80	849.488,33
Gianyar	1.415.829,11	1.360.470,33	1.813.288,19	1.818.841,15	1.828.289,53
Klungkung	3.048.917,52	3.084.875,13	3.958.769,22	3.684.016,57	3.756.120,11
Bangli	2.469.060,02	2.557.707,12	3.361.993,00	3.272.189,11	3.041.703,17
Karangasem	1.710.301,39	1.728.471,08	2.282.444,07	2.299.258,79	2.261.055,71
Buleleng	1.475.281,44	1.521.717,25	2.008.316,69	2.010.275,15	1.894.605,26
Denpasar	802.741,47	774.113,48	978.710,70	931.511,01	945.042,72
Provinsi Bali	1.422.283,32	1.416.377,14	1.864.704,48	1.837.111,97	1.785.534,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019, (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa dana perimbangan tertinggi terletak pada Kabupaten Klungkung dengan rata-rata nilai dana perimbangan mencapai Rp3.506.539,71 per kapita selanjutnya disusul oleh Kabupaten Bangli dengan rata-rata dana perimbangan mencapai Rp2.940.530,49 per kapita, sedangkan dana perimbangan terendah terletak di Kabupaten Badung dengan rata-rata nilai dana perimbangan mencapai Rp749.623,47 per kapita. Permasalahan yang terjadi pada dana perimbangan yaitu masih terjadi ketimpangan fiskal dan juga terjadi permasalahan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang mana dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis digunakan untuk belanja pegawai.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Pada saat ini pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi keinginan pemerintah dalam melakukan kebijakan, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menyangkut pembangunan daerah yaitu mengenai otonomi daerah, seperti yang tercantum di dalam dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diterapkannya kedua undang-undang ini akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional.

Pemberian otonomi daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk memperbaiki kondisi pelayanan publik, perkembangan perekonomian daerah, serta dalam mengembangkan berbagai terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Daerah-daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Kewenangan pemerintahan daerah melalui otonomi akan memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, regional, nasional, maupun global (Nehen, 2016:409).

Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya (Taras dan Artini, 2017). Sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan daerah berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya (Lamaon dan Omwenga, 2017). PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah (Caraka, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai upaya regional untuk mengurangi ketergantungan dalam memperoleh dana (subsidi) dari pemerintah pusat (Yahya, *et al*, 2017).

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Rupiah Per Kapita)

Kabupaten/ Kota	PAD Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	331.169,92	360.944,94	419.076,06	441.405,87	457.256,93
Tabanan	631.032,73	690.064,28	725.390,65	967.428,01	819.324,62
Badung	4.517.381,06	4.869.345,01	5.656.285,14	6.484.005,28	6.935.174,92
Gianyar	865.387,45	92.347,04	1.060.577,70	1.315.248,02	1.515.852,88
Klungkung	565.433,44	683.187,23	759.151,41	863.645,86	1.048.649,94
Bangli	344.064,44	394.120,13	468.406,62	464.647,55	542.379,55
Karangasem	588.846,54	594.876,23	774.303,31	481.044,23	483.030,97
Buleleng	342.024,49	453.479,52	433.954,62	696.443,43	510.583,53
Denpasar	809.101,16	881.460,54	899.420,70	1.103.260,10	1.010.219,57
Provinsi Bali	711.446,49	732.341,22	724.076,87	800.299,61	866.338,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2019, (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki PAD tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki PAD sebesar Rp5.692.438,28 per kapita kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar dengan nilai PAD sebesar Rp969.882,62 per kapita, namun berbeda halnya dengan Kabupaten Jembrana yang memiliki PAD terendah, yang mencapai Rp401.970,75 per kapita. PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki ketimpangan atau terjadinya disparitas yang sangat besar yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Permasalahan PAD dapat dilihat melalui lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta potensi PAD masing-masing daerah yang sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya *fiscal gap*. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah yang sangat Tabel 1.2 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki PAD tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki PAD sebesar Rp5.692.438,28 per kapita kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar dengan nilai PAD sebesar

Rp969.882,62 per kapita, namun berbeda halnya dengan Kabupaten Jembrana yang memiliki PAD terendah, yang mencapai Rp401.970,75 per kapita. PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki ketimpangan atau terjadinya disparitas yang sangat besar yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota tersebut. Permasalahan PAD dapat dilihat melalui lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta potensi PAD masing-masing daerah yang sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya *fiscal gap*. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah yang sangat beraneka ragam, ada daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar tetapi karena struktur ekonomi yang telah tertata dengan baik, maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya, dalam artian terjadi peningkatan PAD (Caraka, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

1) Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke daerah yang lebih baik, selain itu desentralisasi dapat diartikan sebagai

pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fungsi dari desentralisasi dapat dilihat melalui penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas (Kharisma, 2013). Desentralisasi pada dasarnya tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai dimensi yang beragam, khususnya menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi, dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial ekonomi.

2) Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai upaya regional untuk mengurangi ketergantungan dalam memperoleh dana (subsidi) dari pemerintah pusat (Yahya, *et al*, 2017). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (BPS Provinsi Bali, 2017).

3) Konsep Dana Perimbangan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Dengan kata lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal (Ogujiuba, *et al*, 2012). Menurut BPS Provinsi Bali, Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4) Konsep Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja pegawai didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja barang dan jasa didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari setahun. Belanja barang dan jasa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian atau pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan pemakaiannya digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal juga dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

5) Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993; 169): Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti

pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Peranan pemerintah pada tahap menengah tetap besar karena peranan swasta banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak serta kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Teori hukum wagner mengemukakan teori dalam suatu hukum mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Bunyi Hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah semakin besar terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Teori Peacock dan Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto, 1993:173). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesoebroto (1993:173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian berbentuk pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif. Pendekatan asosiatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014: 128). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dipilihnya lokasi ini karena masih terdapat pembangunan yang belum merata yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih mengalami ketimpangan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Objek penelitian ini lebih berfokus pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja langsung, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2018. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 72 yang menampilkan data panel yang terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan rentang waktu pengamatan 8 tahun, maka di dapat $9 \times 8 = 72$ titik pengamatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Suyana, 2016:159). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan struktur I

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan struktur II

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

X_1 = pendapatan asli daerah (PAD)

X_2 = dana perimbangan

- Y₁ = belanja langsung
- Y₂ = pertumbuhan ekonomi
- e₁, e₂ = variabel pengganggu
- b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = koefisien dari masing-masing variabel

Nilai kekeliruan taksiran standar, yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R_i^2)} \dots \dots \dots (3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - (e_1^2 e_2^2 \dots e_p^2) \dots \dots \dots (4)$$

Dalam hal ini interpretasi R_m^2 sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi. P_{ei}^2 yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumas:

$$P_{ei} = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (5)$$

Pengujian pengaruh tidak langsung biasa disebut dengan uji sobel, yang mana uji sobel melakukan pengujian terhadap variabel intervening. Uji sobel memiliki dua persamaan, yaitu sebagai berikut. Persamaan I pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X₁) melalui Belanja Langsung (Y₁) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂).

$$Sb_1b_5 = \sqrt{b_5^2 s_{b_1}^2 + b_1^2 s_{b_5}^2} \dots \dots \dots (6)$$

Persamaan II yaitu pengaruh tidak langsung Dana Perimbangan (X₂) melalui Belanja Langsung (Y₁) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂).

$$Sb_2b_5 = \sqrt{b_5^2 s_{b_2}^2 + b_2^2 s_{b_5}^2} \dots \dots \dots (7)$$

Untuk mengetahui dan menghitung nilai z-hitung dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$z = \frac{b_1b_5}{sb_1b_5} \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan:

Sb₁b₅, Sb₂b₅ = besarnya standar *error* tidak langsung

Sb_1	= standar <i>error</i> koefisien b_1
Sb_2	= standar <i>error</i> koefisien b_2
Sb_5	= standar <i>error</i> koefisien b_5
b_1	= jalur X_1 terhadap Y_1
b_2	= jalur X_2 terhadap Y_1
b_5	= jalur Y_1 terhadap Y_2
b_1b_5	= jalur X_1 terhadap Y_1 (b_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (b_5)
b_2b_5	= jalur X_2 terhadap Y_1 (b_2) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (b_5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan metode regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS. Koefisien jalur diperoleh melalui beberapa tahapan yang dapat diselesaikan melalui model persamaan regresi, yaitu sebagai berikut.

$$\text{Persamaan struktur I : } Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

$$\text{Persamaan struktur II : } Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2$$

Keterangan:

X_1	= pendapatan asli daerah (PAD)
X_2	= dana perimbangan
Y_1	= belanja langsung
Y_2	= pertumbuhan ekonomi
e_1, e_2	= variabel pengganggu
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= koefisien dari masing-masing variabel

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengujian persamaan struktur I dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja langsung yang dilakukan secara langsung menggunakan program SPSS, maka hasil regresi dapat disajikan pada tabel, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3 Hasil *Coefficients* Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	126557,575	36285,099		3,488	,001
1 PAD	,218	,014	,413	15,213	,000
Dana Perimbangan	,575	,025	,628	23,137	,000

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Tabel 1.3 menggambarkan hasil analisis jalur persamaan struktur I, maka dapat dibuat persamaannya yaitu sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = 0,413X_1 + 0,628X_2$$

Tabel 1.3 menunjukkan hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,413 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan dana perimbangan dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,628 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,413 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Hubungan positif dan signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamni, dkk (2014) serta Lisa dan Priyagus (2017) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, hal ini menunjukkan bahwa ketika PAD provinsi mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan juga pada belanja langsung provinsi tersebut. PAD memiliki tujuan sendiri yaitu memberikan kewenangan serta keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada pemerintahan daerah tersebut, sehingga PAD yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya juga akan meningkatkan belanja langsung pada

daerah tersebut, seperti peningkatan yang terjadi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,628 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Hubungan positif dan signifikan antara variabel dana perimbangan terhadap belanja langsung yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Priyagus (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Artinya ketika dana perimbangan suatu daerah mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi belanja langsung dari daerah yang bersangkutan. Dana perimbangan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dana perimbangan memiliki tujuan sendiri yaitu untuk mengurangi ataupun mengatasi kesenjangan fiskal yang terjadi pada suatu daerah, dengan diberlakukannya tujuan tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengujian persamaan struktur II dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, adapun hasil regresi dapat disajikan pada tabel, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4 Hasil *Coefficients* Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23555,528	1747,757		13,478	,000
1 PAD	-,001	,001	-,177	-,896	,374
Dana Perimbangan	-,010	,001	-,929	-6,962	,000
Belanja Langsung	,007	,002	,601	3,254	,002

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel 4.2 menggambarkan hasil analisis jalur persamaan struktur II, maka dapat dibuat persamaannya yaitu sebagai berikut.

$$\hat{Y}_2 = -0,177X_1 + (-0,929X_2) + 0,601Y_1$$

Tabel 1.4 menunjukkan hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,177 dengan nilai signifikansi sebesar $0,374 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,929 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, belanja langsung memiliki nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,601 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,005$ yang hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,177 dengan nilai probabilitas sebesar $0,374 > 0,05$ hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif dan tidak signifikan yang terjadi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan suatu daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mafahir dan Soelistiyo (2017), serta Arief (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada PAD maka akan terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali masih terlalu rendah serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang mengatakan bahwa akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu modal merupakan unsur produksi, yang mana akan mempengaruhi penerimaan daerah yaitu pajak, di mana pajak dalam hal ini dapat mengurangi konsumsi sehingga penerimaan akan ikut berkurang dan akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah juga menurun atau dengan kata lain masih lemahnya pemungutan pajak pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar -0,929 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pendapatan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif dan signifikan yang terjadi antara variabel dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2017) dana perimbangan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief (2019), Badrudin and Kuncorojati (2017), serta Jumasrah (2018), menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan terjadinya peningkatan pada dana perimbangan akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain semakin besar dana perimbangan yang diperoleh maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu dana perimbangan yang diperoleh tidak secara keseluruhan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang digunakan, itu pun terkadang digunakan untuk program-program atau kegiatan yang kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,601 dengan nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif dan signifikan antara variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnadi, dkk (2016) serta Dilliana, *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika belanja langsung mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan desentralisasi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi juga mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan di atas dapat menggambarkan nilai kekeliruan taksiran standar, yaitu sebagai berikut. Nilai e_1 digunakan untuk mengetahui jumlah *variance* variabel belanja langsung yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{(1 - R_1^2)} \\ &= \sqrt{(1 - 0,982)} \\ &= 0,134 \end{aligned}$$

Nilai e_2 digunakan untuk mengetahui jumlah *variance* variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja langsung, maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{(1 - R_2^2)} \\ &= \sqrt{(1 - 0,727)} \\ &= 0,522 \end{aligned}$$

Nilai kekeliruan standar dapat menggambarkan atau dapat mengetahui validitas model dalam penelitian ini. Validitas model dilakukan untuk memeriksa model tersebut valid atau tidaknya. Valid tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Validitas model memiliki indikator, yaitu koefisien determinasi total. Koefisien determinasi total dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (e_1^2) (e_2^2) \\ &= 1 - (0,134^2) (0,522^2) \\ &= 1 - (0,018) (0,272) \\ &= 0,995 \end{aligned}$$

Keterangan:

R_m^2 = Koefisien determinasi total
 e_2, e_1 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi total di atas, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99,5 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung pada data sebesar 99,5 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu sebesar 0.5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Analisis jalur tidak hanya digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung tetapi juga digunakan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung atau yang dikenal dengan uji sobel, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali
 - a. Menentukan *standard error* pengaruh tidak langsung

$$\begin{aligned} Sb_1b_5 &= \sqrt{b_5^2 s_{b_1}^2 + b_1^2 s_{b_5}^2} \\ &= \sqrt{(0,007^2)(0,014^2) + (0,218^2)(0,002^2)} \\ &= 0,00045 \end{aligned}$$

- b. Menghitung nilai z-hitung

$$\begin{aligned} z &= \frac{b_1 b_5}{s b_1 b_5} \\ &= \frac{0,218 \times 0,007}{0,00045} \\ &= 3,414 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka di peroleh nilai z-hitung sebesar 3,414 > 1,96 hal ini berarti belanja langsung merupakan veraiabel intervening pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung.

- 2) Pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali

- a. Menentukan *standard error* pengaruh tidak langsung

$$\begin{aligned}
 Sb_2b_5 &= \sqrt{b_5^2 s_{b_2}^2 + b_2^2 s_{b_5}^2} \\
 &= \sqrt{(0,007^2)(0,025^2) + (0,575^2)(0,002^2)} \\
 &= 0,0012
 \end{aligned}$$

- b. Menghitung nilai z-hitung

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{b_2 b_5}{sb_2 b_5} \\
 &= \frac{0,575 \times 0,007}{0,0012} \\
 &= 3,461
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka di peroleh nilai z-hitung sebesar 3,461 > 1,96 hal ini berarti belanja langsung merupakan veraiabel intervening pada variabel dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain dana perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung.

Tabel 1.5 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak langsung, dan Pengaruh Total Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Langsung, serta Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Bali

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y ₁	
X ₁ → Y ₁	0,413	-	0,413
X ₁ → Y ₂	-0,177	0,248	0,071
X ₂ → Y ₁	0,628	-	0,628
X ₂ → Y ₂	-0,929	0,377	-0,552
Y ₁ → Y ₂	0,601	-	0,601

Keterangan:

X₁ = pendapatan asli daerah (PAD)

X₂ = dana perimbangan

Y_1 = belanja langsung

Y_2 = pertumbuhan ekonomi

Nilai pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung sebesar 0,248 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 24,8 persen. Nilai pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung sebesar 0,377 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung dana perimbangan melalui belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 37,7 persen.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD dalam penelitian ini belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemerintah dalam hal pemungutan pajak serta belum optimalnya pemerintah dalam menggali potensi yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga nantinya mampu meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini belum optimal, hal tersebut dikarenakan perbedaan potensi serta masih terjadi disparitas antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, salah satu penyebab belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yaitu terkait dengan sektor pariwisata, di mana sektor ini adalah salah satu sektor yang memiliki sumbangan terbesar atau penyokong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Bali. PAD dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang belum optimal memerlukan kajian ulang agar nantinya dapat memberikan pengaruh secara positif.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar

daerah. Dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2017), belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan daerah, dalam penelitian ini belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, yang di mana belanja langsung dalam penelitian ini telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung serta belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Belanja langsung merupakan variabel yang memediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu 1) pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan lebih memperhatikan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar memacu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan dengan pusat ataupun dapat terminimalisir, selain mengoptimalkan potensi daerah dapat juga dilakukan melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah dengan lebih bijak, efektif dan efisien agar nantinya dapat meningkatkan atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diharapkan lebih memperhatikan mengenai pengalokasian dari dana perimbangan itu sendiri, baik dalam rangka mendanai kebutuhan daerah maupun pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendanaan antara pusat dengan daerah,

sehingga nantinya dana perimbangan dapat meningkat secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. 3) Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kegiatan dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah yang dimaksud yaitu terkait dengan belanja langsung. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, nantinya lebih diperhatikan pengalokasiannya oleh pemerintah daerah sehingga komponen-komponen dari belanja langsung dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni, dan Sudibia, I Ketut. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, 11(1), hal: 20-28.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountability in Local Government Revenue Management: Who Does What?. *Information and Knowledge Management*, 2(8), pp: 22-32.
- Ali, Hina, and Batool, Mehvish. 2017. Fiscal Decentralization and Macroeconomic Stability: Theory and Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), pp: 1-14.
- Almfraji, Mohammad Amin, and Almsafir, Mahmoud Khalid. 2013. Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 to 2012. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129, pp: 206-213.
- Arief, Muhammad Faisal. 2019. The Effect of Fiscal Decentralization and Financial Performance on Economic Growth in Distric/City of South Sulawesi Province. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(3), pp: 675-679.
- Azam, Muhammad. 2019. Energy and Economic Growth in Developing Asian Economies. *Journal of the Asia Pacific Economy*, pp: 1-25.
- Badrudin, Rudy, and Kuncorojati, Irawan. 2017. The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare by Capital Expenditure and Economic Growth as an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(1), pp: 54-59.
- Caraka, Rezzy Eko. 2019. Pemodelan Regresi Panel Pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), hal: 55-61.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)[Hartati Dewi, I Gede Wardana]

Chalid, Pheni. 2005. *Kuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan.

Chinweoke, Nwaeze, Ray, N., and Paschal, Nwaeze Okeoma. 2013. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review*, 3(7), pp: 79-87.

Christia, Adissya Mega, dan Ispriyarso, Budi. 2019. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), hal: 149-163.

Dilliana, Siktania Maria, Gayatri, Ratnadi, Ni Made Dwi, and Wirajaya, I Gde Ary. 2019. Regional Financial Performance Mediates the Effect of Regional Balance Funds and Expenditure on Economic Growth. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(6), pp: 164-171.

Fajrii, M., Delis, Arman, dan Amzar, Yohanes Vyn. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), hal: 99-107.

Handayani, Dwi, Rispantyo, Widarno Bambang. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, hal: 169-178.

Jumasrah. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Swasta, dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Pada Tahun 2003-2016. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), hal: 64-79.

Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), hal: 101-119.

Kurniawan, Robi, and Managi, Shunsuke. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), pp: 339-361.

Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), hal: 1-11.

Kusuma, Manggar Wulan, and Badrudin, Rudy. 2016. Fiscal Decentralization Effect on Economic Growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(2), pp: 136-147.

Lamaon, Julius, and Omwenga, Jane. 2017. Influence of Locally Generated Revenue on Performance of County Governments in Kenya. *Public Policy and Administration Research*, 7(7), pp: 23-29.

- Lisa, Yulianus, dan Priyagus. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), hal: 162-173.
- Mafahir, Abdul, dan Soelistiyo, Aris. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), hal: 143-152.
- Miranti, Riyana, Ducan, Alan, and Cassells Rebecca. 2014. Revisiting The Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia During Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), pp: 461-482.
- Nehen, Ketut. 2016. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Ogujiuba, Kanayo, and Abraham, Terfa W. 2012. Testing The Relationship Between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*.
- Ratnadi, Ni Made Dwi, Ariyanto, Dodik, dan Wirawati, Ni Gusti Putu. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Langsung Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 11(1), hal: 1-13.
- Roy, Sayan. 2016. A Critique on Current Paradigms of Economic Growth and Development in The Context of Environment and Sustainability Issues. *The Journal of Sustainable Development*, 16(1), pp: 74-90.
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*, 10(1), hal: 45-55.
- Silva, Indunil De, and Sumarto, Sudarno. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), pp: 227-242.
- Suartha, Nyoman, dan Yasa, I Gst Wayan Murjana. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), hal: 95-107.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, Gracia, and Sumarto, Sudarno. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), pp: 209-227.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)[Hartati Dewi, I Gede Wardana]

Syamni, G., Husodo, Z., dan Syarifuddin. 2014. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), hal:11-19.

Taras, Tyasani, dan Artini, Luh Gede Sri. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), hal: 2360-2387.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Uppun, Paulus. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB dan Pengendalian Kelahiran di Provinsi Sulawesi Selatan. *PIRAMIDA*, 12(2), hal: 59-71.

Utama, Suyana. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: CV. Sastra Utama.

Wati, Masayu Rahma, dan Fajar, Catur Martian. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), hal: 63-76.

Yahya, Idhar, Torong, M. Zainul Bahri, and Muda, Iskandar. 2017. Influence Behavior in Legislature Budget Development of Regions in the Province of Aceh and North Sumatra. *International Journal of Economic Research*, 14(8), pp: 147-159.

Yasa, I Komang Oka Artana, dan Arka, Sudarsana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), hal: 63-71.